

Pengorganisasian Kurikulum dan Pembelajaran pada Sekolah Kejuruan di Lingkungan Pesantren

Nur Ali

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: nurali@uin-malang.ac.id

Abstract. *This paper explains about curriculum management activities in vocational schools within pondok pesantren (WPP). The focus of the discussion is on the orientation of the vocational school curriculum in pesantren and its implementation activities as well as how school leaders and pesantren leaders influence the curriculum implementation organization (OPK) in schools WPP. The aim is to find the orientation, strategy and approach of OPK activities in vocational schools WPP. This research used qualitative research with a case study design. Data was collected through in-depth interviews with leaders of Islamic boarding schools, school leaders, and teachers by purposive sampling, observation, and document analysis. The conclusion of this paper is the activities of OPK have led to innovation in curriculum management and learning in schools WPP. The OPK strategy uses Collaborative-collegial management with a democratic approach based on the noble values of pesantren and professionalism.*

Keyword. *Micro and macro curriculum; Organization of curriculum; Democratic approach; stake-holders*

Abstrak. Artikel ini menjelaskan tentang kegiatan manajemen kurikulum pada sekolah kejuruan di lingkungan pondok pesantren (LPP). Fokus pembahasannya pada orientasi kurikulum sekolah kejuruan di pesantren dan kegiatan pelaksanaannya serta bagaimana pimpinan sekolah dan pengasuh pesantren memberi pengaruh pada organisasi pelaksanaan kurikulum (OPK) sekolah di LPP. Tujuannya untuk menemukan orientasi, strategi dan pendekatan kegiatan OPK pada sekolah kejuruan di LPP. Kajian ini menggunakan qualitative research dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pimpinan pesantren, pimpinan sekolah, dan para guru secara purposive sampling, observasi, dan analisis dokumen. Kesimpulan dari artikel ini adalah kegiatan OPK melahirkan inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran pada sekolah di LPP. Strategi OPK menggunakan *Collaborative-collegial management* dengan pendekatan demokratis berdasarkan pada nilai-nilai luhur pesantren dan profesionalitas.

Kata Kunci. Kurikulum Makro dan mikro; Organisasi kurikulum; Pendekatan demokratis; stake holder

Copyright © JMPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. All Right Reserved.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dibidang pendidikan yang dimulai dengan lahirnya PP nomor 25 tahun 2000 dan era teknologi informasi mendorong masyarakat untuk mengembangkan jenis pendidikan dan mempermudah mereka untuk mengakses berita dan materi kurikulum dari berbagai sumber dan informasi. Oleh karena itu pengembangan jenis, jenjang dan inovasi manajemen pengembangan kurikulum sekolah tidak cukup hanya melihat secara mikro tetapi juga perlu meninjau secara makro. Pada level mikro,

kurikulum biasanya dimaknai sebagai seperangkat kegiatan yang berisi materi pembelajaran yang akan dipakai, strategi belajar-mengajar yang akan diterapkan serta model evaluasi yang akan digunakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Pada level makro, kurikulum dimaknai sebagai kumpulan kepentingan dari berbagai unsur mulai dari kepentingan pemerintah pusat, daerah, organisasi keagamaan, organisasi profesi sampai pada kepentingan hubungan relasi bisnis dan bahkan antar Negara. Hal demikian dapat dilihat dari dinamika perubahan dan pengembangan kurikulum yang diberlakukan di Indonesia mulai jaman penjajahan sampai kurikulum 2013 edisi revisi. Karena itu kurikulum yang diberlakukan pada sekolah-sekolah Belanda dengan sekolah-sekolah rakyat memiliki perbedaan. Demikian pula dengan kurikulum yang dipakai pada pendidikan madrasah dan sekolah kejuruan umum di lingkungan pondok pesantren (LPP) dengan lainnya juga berbeda-beda. Dari sini nampak bahwa kurikulum dikembangkan dan dikelola seiring dengan kemajuan jaman, kepentingan dan tuntutan masyarakat secara dinamis serta kondisi kelas dimana para murid akan belajar.

Perkembangan dan perubahan kurikulum di sekolah juga merupakan salah satu dari bentuk upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal demikian dapat dilihat dari UU Sisdiknas nomor 2 tahun 1998 pada pasal (1) yang menjelaskan “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar” dan pasal 37 yang mendefinisikan bahwa “kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan”, dan UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, pasal 1 bahwa kurikulum dimaknai sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”, ayat 36, pasal 2 menyatakan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Kedua pengertian kurikulum tersebut memberi pemahaman bahwa kurikulum harus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat serta perkembangan siswa karena OPK dan manajemennya antara daerah, lembaga dan negara yang satu dengan lainnya berbeda-beda yang disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan, kepentingan, adat-istiadat, dan agama. OPK yaitu kegiatan mengorganisir pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum yang terdiri dari beberapa komponen kurikulum menjadi beberapa mata diklat/mata pelajaran, program kurikuler dan ekstrakurikuler, *lessons study*, topik, unit yang tujuannya untuk memudahkan para guru dan siswa dalam memahami isi kurikulum sehingga kompetensi yang ditetapkan dapat dikuasai secara efektif dan efisien (Sugiana, A., (2018)

Sejak tahun 1990, pengembangan dan pengelolaan kurikulum pada sekolah dan madrasah di lingkungan pesantren mengalami perubahan yang cukup signifikan karena telah terjadi proses transformasi kurikulum substansi dari madrasah yang fokus materi kurikulumnya pada keagamaan menjadi madrasah yang menggunakan kurikulum

pemerintah yang materi kurikulumnya di bidang umum sama dengan sekolah umum. Proses transformasi ini terjadi sebagai dampak dari dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, SK Mendikbud Nomor 28 Tahun 1990, SK Mendikbud Nomor 0487/U/1992 dan SK Mendikbud Nomor 054/U/1993 yang isinya menyebutkan diantaranya bahwa SD dan SLTP/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di beri namai Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan MadrasahTsanawiyah (MTs), Madrasah tersebut wajib memberikan materi kurikulum sekurang-kurangnya sama dengan SD dan SMP. Sedangkan PP Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah. SK Mendikbud Nomor 0489/U/1992 dan SK Menag Nomor 370 tahun1993, menyebutkan diantaranya yaitu Madrasah Aliyah merupakan SMU berciri khas keagama Islam.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dari aspek kurikulum sudah mengalami perubahan besar dimana sudah tidak ada lagi perbedaan antara kurikulum inti yang ada pada pendidikan madrasah dan kurikulum inti yang ada pada pendidikan umum. Status tersebut diperkuat dalam Undang-undang. Implikasinya adalah madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional mulai tingkatan Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Umum dan kejuruan diberi hak dan kewenangan sama dengan SD, SMP, dan SMU. Sehingga ujian nasional pendidikan madrasah pada tiap-tiap jenjang dan tingkatan dapat dikelompokkan dengan sekolah umum. Dari kebijakan itu kemudian lahir berbagai strategi dan pendekatan dalam OPK di madrasah dan sekolah, termasuk sekolah kejuruan yang ada di lingkungan pondok pesantren (LPP).

Pengorganisasi pelaksanaan kurikulum pada sekolah kejuruan yang ada di LPP dan yang ada di luar pesantren memiliki peran penting dalam upaya untuk memenuhi perkembangan jaman dan kebutuhan *stake-holders*. Menurut Fadjar (1999) terdapat tiga hal yang akan dijadikan dasar oleh masyarakat untuk memilihkan sekolah/bagi anaknya yaitu; "(i) harapan dan cita-cita masa depan hidupnya, (ii) nilai dan karakter religiousitas, dan (iii) tingkatan status yang dimiliki". Oleh sebab itu seseorang yang status pendidikan dan sosialnya bagus, maka dia pertimbangannya semakin banyak untuk memilihkan suatu sekolah. Sebaliknya jika seseorang itu status sosialnya atau tingkatan pendidikannya rendah, maka pertimbangannya lebih sederhana untuk memilihkan sekolah atau madrasah. Sedangkan Masdar dalam Rahardjo (1989) menyatakan bahwa anak-anak sejak dini dipilhkan pada sekolah-sekolah umum, namun ketika mereka di luar jam sekolah, berada di lingkungan pesantren untuk memperoleh; (i) kegiatan dan pengajaran agama seperti misalnya kajian al-qur'an, kajian al-hadits, teologi, studi fikih, aqidah akhlak dan sejarah peradaban islam yang memang diperlukan untuk *ibadah* sehari-hari dan sebagai dasar dalam berperilaku sehari-hari di masyarakat, (ii) pengarahan dan bimbingan yang bijaksana untuk mengenal dan menyakini Allah sebagai Tuhan secara benar dan baik serta dapat mengamalkannya secara istiqomah, dan (iii) Pengajaran dan pembimbingan secara intensif berkaitan dengan ilmu alat atau landasan keilmuan dasar seperti misalnya pembelajaran bahasa bahasa Arab dan bahasa Inggris dan ilmu nahwu dan shorof. Oleh karena itu, penambahan jenis dan jenjang pendidikan umum di LPP perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa; (1) saat ini semakin bertambah jumlah sekolah umum di LPP yang mengadopsi sistem pendidikan modern dari tingkatan pendidikan dasar sampai Pendidikan tinggi, dan (2) dengan sekolah umum di lingkungan pesantren, maka para santri di samping memperoleh latihan dan kebiasaan untuk disiplin dalam mengikuti

kegiatan keagamaan, mereka juga dapat meneruskan pendidikannya pada jenjang pendidikan lebih tinggi dimanapun yang mereka dikehendaki.

Dalam lingkup kebijakan otonomi pendidikan, aspek kurikulum menjadi salah satu komponen yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan *stakeholder* dimana sekolah itu berada sehingga mendorong untuk diterapkannya sistem manajemen berbasis sekolah (SBM) dan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum. Oleh karena itu lahir pula kurikulum yang didasarkan pada kemampuan yang disebut dengan “kurikulum berbasis kompetensi” dan kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan sekolah yang disebut dengan “kurikulum tingkat satuan pendidikan” Fadilah, et.al (2018). Kondisi tersebut memberi peluang kepada masing-masing sekolah untuk melakukan inovasi manajemen pengembangan kurikulum.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penelitian tentang pengorganisasian pelaksanaan kurikulum pada sekolah kejuruan di LPP menjadi urgen untuk dilakukan agar diperoleh informasi bagaimana OPK pada sekolah-sekolah kejuruan di LPP berlangsung.

B. METODE

Penelitian dengan desain studi kasus (Yin, 2000) ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian difokuskan pada organisasi pelaksanaan kurikulum (OPK) pada SMK Telkom DU yang berlokasi di lingkungan pesantren. Data yang berkaitan dengan fokus dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada kyai, anggota MPP, pimpinan sekolah dan guru secara *purposive sampling*, kegiatan observasi, dan analisis dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses *collection, reduction, display data, verification* dan *conclusion* sebagaimana yang direkomendasikan oleh Miles and Huberman (1994). Untuk kepentingan keabsahan data dilakukan pemeriksaan data melalui metode triangulasi, members check dan forum group discussion (FGD). Dengan teknik ini, akan diperoleh temuan penelitian yang relatif akurat dan objektivitas serta mengurangi subjektivitas informan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Orientasi Kurikulum Sekolah Kejuruan di Pesantren

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Darul Ulum merupakan pendidikan kejuruan berbasis pesantren yang berlokasi di lingkungan pesantren Darul Ulum (DU) Jombang. SMK Telkom DU didirikan tahun 1996 atas kerjasama Yayasan DU dengan PT Telkom. Pendirian SMK Telkom atas prakarsa KH As'ad Umar sebagai Pimpinan Pesantren DU dan Ir. Kristiono sebagai pimpinan PT. Telkom. Penyelenggaraan sekolah kejuruan di pesantren ini dilatarbelakangi oleh keinginan besar para Pengasuh pesantren Darul Ulum untuk mempersiapkan SDM yang akan mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan industry (DUDI). Orientasi SMK Telkom DU adalah penyiapan SDM santri untuk mengisi peluang kerja di bidang telekomunikasi dan informatika/komputer, bertaqwa dan berakhlakul karimah dan atau dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan minat dan bidangnya dengan motto “Bersoftware Religi dan Berhardware Tecknologi” . Sedangkan visi sekolahnya yaitu menjadi SMK berstandar Internasional yang dapat bersaing di level regional dan global berlandaskan nilai-nilai keislaman. Untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui misi sekolah yaitu; “(1)

menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan terpadu dengan pendidikan pesantren dalam rangka mencetak SDM yang beriman dan bertaqwa, profesional, kompeten, mandiri dan berkarakter islami, (2) meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pesantren sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEKS, (3) melaksanakan DIKLAT dengan mengacu pada standar mutu nasional dan internasional, (4) meningkatkan kerjasama dengan DUDI untuk menjamin adanya *Link and Match* dalam penyelenggaraan DIKLAT, dan (5) meningkatkan daya serap lulusan di DUDI atau atau meneruskan ke pendidikan tinggi (PT) yang sesuai". (Dok. SMK Telkom DU, 20018).

Sekolah kejuruan di lingkungan pesantren yang pendiriannya melibatkan dua instansi yaitu lembaga pesantren dengan pihak DUDI yakni PT. Telkom memiliki implikasi pada OPK sekolah. Oleh sebab itu proses perencanaan kurikulum yang dipakai, dan model pelaksanaan kurikulum dan evaluasinya serta pendekatan yang digunakan senantiasa mempertimbangkan kepentingan dua pihak dan *stake holder*. Dalam menjalankan pengelolaan kurikulum, sedikitnya terdapat lima prinsip yaitu: (1) Productivity, (2) democratization, (3) cooperation, (4) effectiveness and efficiency, (5) mengfokuskan pada visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum (Sanjaya, 2008) dengan ruang lingkup; merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum (Fadilah, et. al., 2018)

Di era otonomi daerah dan teknologi informasi ini, OPK di SMK Telkom DU telah mendasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan lingkungan eksternal pada tingkat makro dan lingkungan internal pada tingkat mikro. Dengan demikian, pengorganisasian pelaksanaan kurikulum pada sekolah kejuruan di lingkungan pesantren telah berlangsung secara ideal (Hidayat, 2011). Idealitas pengorganisasian kurikulum pada sekolah kejuruan ini terlihat dari orientasi pengembangan kurikulumnya untuk mencapai mutu dalam KBM dan kualitas yang diharapkan oleh pengguna lulusan yang direfleksikan dengan mutu lulusannya yang diterima dalam DUDI sehingga melahirkan *distingi* dengan sekolah kejuruan di luar pesantren. Dengan demikian, manajemen kurikulumnya telah memenuhi unsur mutu *in fact* dan kualitas *in perception*. Kedua unsur tersebut terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, *stakeholder* pada sekolah dan pengguna alumninya (Roziqin, 2019).

Disamping itu fungsi-fungsi pengelolaan kurikulum juga sudah dijalankan secara baik pada sekolah SMK Telkom DU, seperti misalnya adanya aktivitas-aktivitas yang berkorelasi pada fungsi manajemen yaitu; (1) pemanfaatan sumber daya kurikulum, (2) peningkatan kesempatan peserta didik untuk mencapai hasil belajar secara maksimal, (3) peningkatan relevansi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat pengguna lulusan, visi-misi pendidikan pesantren, dan orang tua, (4) peningkatan motivasi para civitas akademika untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien yang diciptakan melalui pengorganisasian pelaksanaan kurikulum, (5) peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung pengelolaan kurikulum. Sekolah yang telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut menandakan bahwa prinsip-prinsip *school based management* telah berlangsung dengan baik dan terbukti menjadi sekolah yang efektif (*effective school*) (Fadilah, et. al, 2018).

2. Pengorganisasi Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran Sekolah Kejuruan di Pesantren

Penyelenggaraan sekolah kejuruan yang pendiriannya melibatkan lembaga pesantren dan DUDI memiliki pengaruh pada struktur kurikulum sekolah dan organisasi pelaksanaannya. Oleh sebab kurikulum yang digunakan di SMK Telkom DU terdiri atas unsur kurikulum nasional, kurikulum pesantren dan kurikulum Telkom. Ketiga unsur kurikulum tersebut dijadikan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan kegiatan intra dan ekstra kurikuler di sekolah.

Kurikulum nasional merupakan kurikulum inti yang wajib dipakai oleh semua sekolah di seluruh Indonesia. Kurikulum pesantren merupakan kurikulum yang disusun oleh tim Majelis Pimpinan Pesantren (MPP) yang diberlakukan di pada semua sekolah dan madrasah di lingkungan pesantren DU, sedangkan kurikulum Telkom yaitu kurikulum yang disusun oleh PT. Telkom dan SMK Telkom DU yang diberlakukan hanya untuk sekolah kejuruan tersebut.

Proses perencanaan kurikulum SMK Telkom DU dilakukan dengan melibatkan semua unsur majlis pimpinan pondok pesantren, pimpinan sekolah dan madrasah serta para ustad pondok di pesantren DU sehingga kurikulum produk dari tim ini diberlakukan di seluruh sekolah, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya di bawah naungan MPP. Sedangkan kurikulum SMK Telkom DU disusun oleh tim yang terdiri unsur sekolah, PT. Telkom, pihak dunia usaha-industri (DUDI) dan alumni. Produk kurikulum yang dihasilkan dari pemerintah, pesantren dan sekolah tersebut dikelompokkan menjadi dua group yaitu bidang matadiklat normatif, bidang matadiklat adaptif, dan bidang diniyah, dan bidang matadiklat produktif dan prakerin.

Mekanisme OPK kelompok pertama bersifat sentralistik dari MPP sehingga penentuan mata diklat normatif, adaptif, dan diniyah beserta guru yang akan mengajar ditetapkan oleh unit pendidikan pesantren yang merupakan salah satu bagian institusi yang bawah kordinasi di MPP. Penentuan guru mata diklat ini dengan menggunakan sistem "rolling" karena sistemnya sentralistik dari MPP. Penggunaan sistem "rolling" bertujuan untuk menciptakan penyegaran suasana dan motivasi kerja sehingga dapat menghindari kejenuhan pada tempat kerja tertentu. Sedangkan OPK kelompok kedua bersifat otonom, sehingga penentuan mata diklat produktif dan prakerin serta guru yang akan mengajarnya ditetapkan oleh pihak SMK Telkom DU dan PT. Telkom. Adapun penentuan lokasi prakerin ditetapkan oleh pihak SMK Telkom DU dengan melibatkan PT. Telkom, para alumni yang sudah bekerja dan siswa peserta prakerin. Sedangkan pendistribusian guru dan pengaturan jadwal di kelas diserahkan pada para waka kurikulum masing-masing sekolah di lingkungan pesantren DU.

Pembagian pelaksana kurikulum tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan visi-misi pesantren DU dan visi-misi SMK Telkom DU karena MPP Darul Ulum merupakan unit yang membawahi semua jenjang pendidikan mulai dari tingkatan pendidikan dasar baik madrasah, sekolah sampai PT dan pengajian kitab kuning di lokasi pesantren. Dengan pengaturan tersebut, maka antara visi-misi pesantren dan sekolah dapat dijalankan dengan efektif dan mudah di evaluasi. Oleh karena itu visi-misi SMK Telkom DU mengakomodir dari visi-misi pesantren DU dan kebutuhan dunia usaha dan Industri (DUDI) yang dipresentasikan oleh PT. Telkom dan Alumni yang sudah bekerja.

Pelaksanaan kurikulum SMK Telkom DU melibatkan dari unsur pesantren dan unsur PT. Telkom sebagai implikasi dari kerjasama yang dilakukan saat pendirian awalnya, Sedangkan pelibatan dari unsur DUDI merupakan salah satu strategi untuk mendekatkan siswa dengan dunia usaha dan industri karena salah satu item visi-misi Sekolah adalah untuk mengisi peluang kerja yang salah satunya adalah di dunia usaha. Pengorganisasian pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di SMK telah mendasarkan pada aspek kurikulum pada tingkat mikro dan makro. Secara mikro, SMK ini sudah mengatur kurikulumnya dengan mendasarkan pada prosedur pelaksanaan kurikulum di sekolah sebagaimana aturan yang ada. Sedangkan secara makro, Sekolah ini telah mengakomodasi berbagai kepentingan baik kepentingan pesantren dan alumni, serta kepentingan DUDI. Oleh karena itu SMK Telkom DU merupakan salah satu sekolah ideal. Idealitas sekolah juga nampak pada profil sekolahnya yaitu “menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengisi peluang kerja di bidang telekomunikasi dan informatika/komputer, bertaqwa dan berakhlakul karimah” (Dokumen SMK, 2018).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka SMK Telkom DU dapat dikatakan sebagai sekolah yang bertujuan untuk memberikan bekal dasar kepada para siswanya untuk memiliki dan menguasai IPTEKS dan membentuk siswa yang berkepribadian, beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah melalui penciptaan suasana akademik profesional dan religius berbasis pesantren (Imtaq). Di samping itu, dengan melakukan kerjasama dengan DUDI, SMK ini dapat memenuhi perkembangan kebutuhan *stakeholder* dengan mempersiapkan mereka untuk *linked* dengan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat dan pengguna lulusannya. Dengan demikian, fungsi utama dari manajemen pengembangan kurikulum telah berjalan di sekolah kejuruan ini, misalnya adanya kegiatan-kegiatan seperti; pengembangan dan pemberdayaan SDM pendidikan yang sudah tersedia serta meningkatkan kinerja sekolah yang bersangkutan. Fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan oleh sebagian besar lembaga pendidikan swasta dalam upaya mencapai lulusan sekolah yang diinginkan melalui kebijakan manajemen kurikulumnya. Oleh sebab itu, kinerja sekolah dipengaruhi oleh kebijakan sekolah yang menyangkut pengelolaan kurikulum pada tingkat sekolah dengan melakukan peningkatan pemberdayaan dan peranserta para orangtua, masyarakat dan *stake holder*. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui, membantu, dan mengevaluasi OPK, sehingga sekolah selain diharapkan bisa bekerjasama juga dapat independent dalam mengidentifikasi keperluan kurikulum, merancang kurikulum, menetapkan skala prioritas, dan melakukan aktivitas pembelajaran.

Atas dasar deskripsi di atas, Sekolah kejuruan di LPP dapat dikatakan telah mampu memenuhi tantangan masyarakat sekarang dan masa depan sesuai dengan arah Sisdiknas nomor 20 tahun 2023, yang mengfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan. Di lihat dari segi mutu, Sekolah kejuruan ini juga telah memberi bekal kepada siswanya untuk mempunyai pandangan dan sikap yang positif terhadap agama, dan hubungannya dengan sains, dan teknologi. Hal ini sesuai dengan simpulan Joni (1992) bahwa kehidupan dalam masyarakat itu didasarkan pada sistem nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang diyakini oleh warga masyarakat. Sebagian dari nilai-nilai itu ada yang bersifat lestari dan sebagian lagi ada yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Hal tersebut dapat berpengaruh pada cara berpikir, kerja, dan hidup manusia. Oleh sebab itu, Pengalaman bangsa-bangsa di dunia

menunjukkan bahwa aspek pendidikan menjadi faktor yang cukup signifikan dan utama bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Sebab pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan nilai tambah dan mutu SDM yang berdampak pada kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan merupakan aktivitas untuk peningkatan mutu generasi bangsa pada bidang budaya, sosial, dan perkembangan anak. Dibidang budaya adalah agar generasi bangsa Indonesia dapat memenuhi amanah pasal 32 UUD 1945, yakni agar mereka dapat meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa. Bidang sosial yang terkait dengan SDM, yaitu agar setiap generasi bangsa bermanfaat bagi kehidupan diri mereka sendiri dan masyarakat luas, karena setiap warga masyarakat yang tidak produktif, tidak dapat menganur dirinya sendiri, akan menjadi beban sosial. Sedangkan pada aspek perkembangan anak didik yaitu bahwa setiap anak membutuhkan tuntunan untuk perkembangan potensi-potensi dasar mereka seperti misalnya potensi berpikir, kreatifitas, dan sosial yang potensi tersebut dapat membangun kedewasaan emosional, sikap dan jati diri mereka sebagai manusia yang terpelajar, berilmu dan berpengatahuan.

Untuk memenuhi tuntutan di atas, pendidikan nasional diharapkan mampu melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Sisdiknas, yaitu "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Muhadjir (1993) menyatakan bahwa lembaga pendidikan diharapkan mampu melakukan tiga fungsinya mencakup; (i) melestarikan nilai-nilai insaniyah dan nilai-nilai ilahiyah, (ii) menumbuhkan kembangkan kreatifitas peserta didik, dan (iii) penyiapan SDM produktif yaitu sumber daya yang dapat memahami dan mengantisipasi masa depan, sehingga arah pendidikan dapat memberi warna struktur pekerjaan masa depan "bukan" mengikuti prediksi kebutuhan ekonomi. Harold G. Shane (dalam Fadjar, 1999) juga menyatakan bahwa pendidikan mempunyai empat potensi yang penting dalam kehidupan masa depan suatu masyarakat yaitu; (i) pendidikan menyediakan wahana yang teruji untuk mengaplikasikan nilai-nilai masyarakat yang berkembang dan melahirkan sistem nilai-nilai baru. Karena itu, pendidikan tidak hanya melahirkan hari esok tetapi juga mampu mencerminkan kebudayaan masyarakat yang berubah dan menyiapkan generasi mudanya untuk berperan aktif dan lebih efektif dengan cara berperan aktif dan kreatif untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, (ii) pendidikan dapat digunakan untuk menanggulangi problematika sosial yang berkembang, (iii) pendidikan dapat menunjukkan kemampuannya untuk menerima, menolak dan mengaplikasikan strategi baru dan pilihan alternatif baru, dan (iv) pendidikan merupakan wahana dan cara terbaik yang perlu dipilih oleh masyarakat untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat dan generasi dalam suasana psikologis dan sosiologis yang lebih baik.

OPK yang dilaksanakan di SMK merupakan inovasi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran, dimana pengorganisasian kurikulum untuk mata diklat normatif, adaptif, dan diniyah bersifat sentralistik dari MPP DU sehingga kepentingan pesantren yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan integrasi antara sains dan agama bisa dijalankan secara integratif. Sedangkan untuk mata diklat produktif dan prakerin bersifat otonom dari SMK Telkom DU dan PT. Telkom sehingga sekolah dapat mengakomodir berbagai kepentingan dari dunia usaha dan kepentingan pemerintah, kepentingan stake holder. Oleh karena itu strategi pengembangan kurikulum makro dan

mikro dapat dijalankan secara proporsional (Hidayat, 2011) dengan pendekatan integratif. Sebab integrasi kelembagaan dapat dijalankan untuk mewujudkan visi-misi kelembagaan sekolah dan pesantren (Ali, 2019). Berkaitan dengan aspek kelembagaan, Tonder, S,V,. & Steyn, G,M, (2018) juga menyatakan bahwa *Hybrid Study Approach* disarankan dapat dipakai dalam kegiatan manajemen kelembagaan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global dan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan untuk melakukan OPK di sekolah.

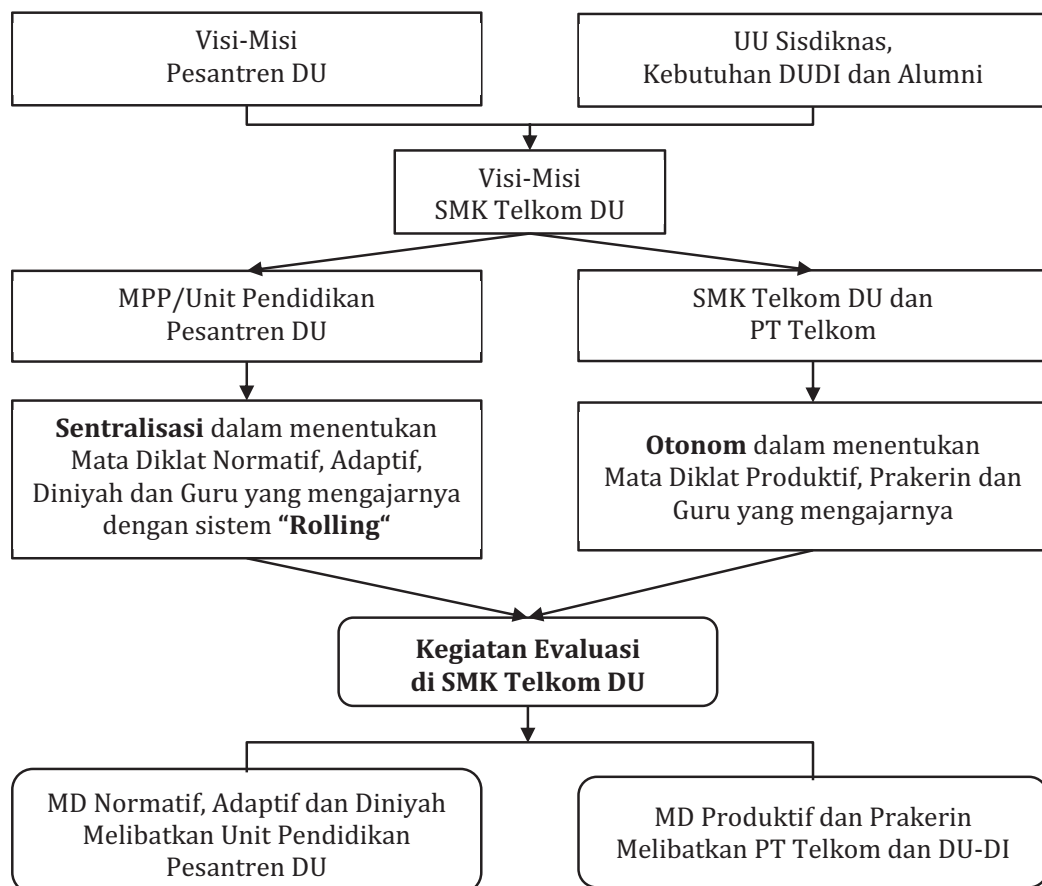
Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, maka keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam OPK di Sekolah dapat difungsikan dengan baik sehingga mampu mengeliminir kendala yang akan muncul dalam mengorganisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah dan kegiatan "prakerin" di lapangan. Dengan demikian, pendekatan demokratis yang sering dianjurkan oleh ahli manajemen kurikulum untuk digunakan oleh sekolah sudah terlaksana dengan baik. Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran yang bersifat politis dengan ciri-ciri diantaranya adalah pendidikan bertujuan mempersiapkan masyarakat yang cerdas dan memiliki kepribadian yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berwirausaha di lingkungan DUDI. Nilai-nilai agama, tradisi keagamaan masyarakat, budaya dan kepentingan produktivitas suatu usaha juga memperoleh perhatian. Oleh sebab itu pendekatan demokratis juga dikatakan sebagai perpaduan antara pendekatan produktivitas dan humanistik (Hamalik, 2006). Dengan demikian, pengembangan keagamaan, kepribadian dan keprofesionalan dapat berjalan secara seimbang sehingga SMK Telkom DU telah mampu menjawab kritik masyarakat terhadap kurikulum pendidikan kejuruan dengan menggunakan pendekatan demokratis. Temuan penelitian disertasi Mustapha (1999) tentang pendidikan kejuruan di Malaysia menunjukkan bahwa (a) para pendidik dan pengguna tenaga kerja meyakini bahwa program kejuruan lebih tepat dibanding dengan pendidikan akademik bagi pengembangan keterampilan dan kemampuan baru dalam pemanfaatan teknologi maju, (b) para pengguna tenaga kerja masih meragukan kerelevansian kurikulum pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan bisnis dan industri kontemporer, sementara partisipasi pengguna tenaga kerja dalam melakukan *partnership* antara sekolah dengan industri masih minim, dan (c) lembaga-lembaga pendidikan kejuruan dan pelatihan seharusnya melakukan *need assessments* secara terus menerus untuk menciptakan kurikulum yang relevan.

Atas dasar uraian di atas dapat nyatakan bahwa perubahan-perubahan dan problem-problem mendasar yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan dan pendidikan di lingkungan pesantren telah dijawab oleh SMK Telkom DU melalui inovasi organisasi kurikulum dan pembelajaran. Menurut Bafadal (2003) kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari keseluruhan program pendidikan dan kurikulum di sekolah dan untuk meningkatkan kualitas program tersebut diperlukan aktivitas inovasi pengelolaan kurikulum yang baik. Sebab, sekolah yang manajemen pengelolaan kurikulumnya baik telah terbukti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Manajemen kurikulum tersebut direfleksikan dalam semangat untuk mengelola kurikulum secara konsisten, sistematis, partisipatif, transparan dan akuntabel baik kurikulum sebagai rencana pembelajaran, kurikulum sebagai proses, maupun kurikulum sebagai input dan output program pendidikan (Fadilah, et. al, 2018). Oleh karena itu, lahirnya sekolah berprestasi dan sekolah yang kurang berprestasi menunjukkan bahwa terdapat keragaman kemampuan dalam mengorganisasi

pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Menurut Oliva (1992) ada empat unsur dalam manajemen pengembangan kurikulum yaitu; (1) program studi, (2) program pengalaman, (3) program layanan, dan (4) hidden curriculum. Sehingga para pelaksana dan pengembang kurikulum di sekolah memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai makna kurikulum, seperti misalnya kurikulum dimaknai sebagai suatu materi yang akan diajarkan dan pembelajaran dimaknai sebagai suatu alat yang dipakai untuk menyampaikan materi tersebut. Sedangkan hasil studi yang dilakukan oleh Scheerens (2003) menunjukkan bahwa kondisi lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan efektivitas kegiatan pendidikan yaitu; (1) adanya stimuli dari pihak luar (eksternal), (2) adanya program khusus, (3) adanya perencanaan dan pengembangan kurikulum, (4) adanya kemitraan antara sekolah dengan *stakeholder*, (5) adanya kegiatan manajemen kelas dan organisasi pengajaran, (6) kepemimpinan yang profesional, (7) lingkungan belajar yang inovatif, (8) waktu belajar yang fungsional, (9) monitoring kemajuan.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa OPK dalam suatu sekolah memerlukan adanya inovasi manajemen sekolah yang berwawasan masa depan sehingga sekolah menjadi *excellent school* dan mampu meningkatkan prestasi akademik berdasarkan standar nasional dan memelihara tradisi keagamaan serta menanamkan nilai-nilai keagamaan. Mekanisme pengorganisasian pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran pada SMK Telkom DU dapat dilihat pada gambar D.1.

Gambar D.1. Mekanisme Pengorganisasian Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran pada SMK Telkom DU



D. KESIMPULAN

Kegiatan pengorganisasian pelaksanaan kurikulum di sekolah kejuruan di lingkungan pesantren yang dilakukan melalui kerjasama dengan DUDI mampu meningkatkan prestasi lulusan sesuai dengan perkembangan kebutuhan jaman, stake holders dan pengguna lulusan. Oleh sebab itu kegiatan inovasi manajemen terutama di bidang kurikulum dan ketenagaan merupakan suatu keniscayaan guna memenuhi kepentingan mikro dan makro kurikulum serta visi-misi lembaga dan orientasi kurikulum sekolah. Kurikulum dan guru memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Kemampuan manajerial pimpinan sekolah dan yayasan pendidikan memiliki pengaruh pada kegiatan OPK di sekolah dan pelaksanaan manajemen kurikulum terbukti memiliki relevansi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan IPTEKS serta partisipasi dan keterlibatan pihak lain seperti misalnya *stake-holders*, DUDI dan pengguna lulusan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sekolah kejuruan yang baik harus memiliki kurikulum yang orientasinya jelas dan baik sehingga memudahkan pengorganisasian pelaksanaan kurikulumnya. Kegiatan OPK harus mengacu pada visi-misi sekolah dan orientasi kurikulumnya dan dijalankan secara demokratis dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait.

REFERENSI

- Ali, Nur. (2019). Integrative Curriculum of Religion and Science at Special Pesantren for University Students. *UlulAlbab, Jurnal Studi Islam* 20 (1): 95-122
- Bafadal, I. (2006). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar; Seri Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fadilah, et. al. (2018). Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Smp Wiraswasta Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, mplementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal AT-TAZAKKI*, 2 (1); 27-33.
- Fadjar, M. (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Hamalik, O. (2012). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R. (2011). Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(2), 178-88
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Departemen Agama RI.
- Joni, T.R. (2000). Memicu Perbaikan Pendidikan Melalui Kurikulum dalam Kerangka Pikir Desentralisasi: Antara Content Transmission dan Pembelajaran yang Mendidik. In Sindhunata (Ed.), *Membuka Masa Depan Anak-anak Kita: Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI* (pp. 33-47). Yogyakarta: Kanisius, Publisher
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0489/U/1992 Tentang Sekolah Menengan Umum
- Masdar. (1989). Pesantren Masa Depan dan Tiga Tipe Kyainya. Dalam Rahardjo (Ed.) *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.

- Miles. B. dan Huberman, A.M. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Muhadjir. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Musthapa, R.B. (1999). The Role of Vocational and Technical Education In The Industrialization of Malaysia as Perceived By Educators and Employers. Indiana: *Dissertation, Purdue University*.
- Olivia, P.F., (2004). *Developing The Curriculum*. New York: Pearso Education, Inc.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- Roziqin, Z. (2019). Menggagas Perencanaan Kurikulum Sekolah Unggul, *As-Sabiqun, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1 (1):44-56
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Scheerens, J., (2003). *Menjadikan Sekolah Efektif*. Jakarta: Logos.
- Sugiana, A., (2018). Proses Pengembangan Organisasi Kurikulum dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Pedagogik*, 05 (02); 257-273
- Tonder, S,V,. & Steyn, G,M,. (2018). Exploring Role Players' Experiences of Learning in Higher Education through a Hybrid Study Approach: A Case Study. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 26 (4), 2179-2194
- Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yin, R.K. (2000). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.